

# MERENUNG ORANG BERPOLITIK DENGAN ESENSI JURDIL DAN LUBER



**Drs. Dindin Muhamad Zaenal Muhyi, M.Pd.**  
(Wakil Dekan III FKIP Universitas Pasundan)

## Pendahuluan

Menakar pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, di Indonesia tidak dapat terlepas dari hasil sumbangsih pemikiran yang cemerlang dari para pemikir orang Indonesia itu sendiri. Hal ini diawali dari masa orde baru sampai orde reformasi.

Bila melihat sejarah, bahwa pemilu pada masa Orde Baru (5 Juli 1971, 2 Mei 1977, 4 Mei 1982, 23 April 1987, 9 Juni 1992 dan 29 Mei 1997) menganut asas Luber, sedangkan pada masa Reformasi (7 Juni 1999, 5 April 2004 dan 9 April 2009) menganut asas Luber dan Jurdil. Menurut saya, Luber Jurdil memiliki arti berikut

1. **Langsung**, bahwa pemilihan suara diberikan secara langsung oleh pemilik suara tanpa perantara siapapun. Hal ini dimaksudkan agar suara pemilih dapat tersalurkan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya.
2. **Umum**, pemilu di Indonesia berlaku secara umum untuk seluruh warga negara tanpa memperhatikan perbedaan agama, ras, suku, status sosial, maupun budaya manapun yang penting pemilih memiliki hak pilih dan dipilih sesuai aturan undang-undang.
3. **Bebas**, dimaksudkan bahwa setiap peserta pemilu bebas untuk memilih siapa pun sesuai dengan hati nuraninya dan bebas dari paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun.
4. **Rahasia**, menandakan pilihan kita tidak ada yang mengetahui,

dengan demikian rahasia dalam pemilu menunjukkan bahwa surat suara untuk calon pemimpin atau calon legislatif yang dipilih tidak akan diketahui oleh siapapun bagaimanapun caranya. Untuk mewujudkan hal ini maka dalam pelaksanaan pemberian suara, para peserta pemilu seorang demi seorang memasuki bilik suara untuk melakukan pemilihan dengan tidak perlu menulis nama pemilih sehingga tidak ada yang mengetahui siapa calon yang telah dipilihnya.

5. **Jujur**, dapat dimaknai bahwa suatu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dari penyelenggara pemilu, pengawas, pemantau, atau bahkan peserta pemilu sendiri. Dengan demikian, tidak ada kecurangan dan manipulasi dalam pelaksanaan pemilu.
6. **Adil**, mengartikan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara adil untuk siapa pun baik kepada peserta maupun pemilih sehingga tidak ada kecenderungan kepada pihak tertentu.

Dari kenyataan dan kejadian yang selama ini kita dengar, kita lihat, begitu miris melihat perilaku dan karakter yang tidak memperlihatkan jiwa pemimpin islami, politisi islami, yang memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Ingatlah setelah masa hidup ada kehidupan lain yang kekal dengan memerlukan pertanggungjawaban selama kita hidup melalui

jalan gelap yang menyakitkan yaitu pintu "maut,"

## Pembahasan

Dalam mengimplementasikan sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita sesuai dengan konstitusi. Telah mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun. Pemilu merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan nasional lima tahunan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Meskipun hari pencoblosan pemilu presiden dan legeslatif baru akan dilakukan pada bulan April 2019, namun tahapan pemilu itu sendiri sudah mulai berjalan. Bahkan saat ini sudah menggeliat dan memasuki masa kampanye debat para calon.

Pesta demokrasi lima tahunan harus dipandang kegiatan yang sakral dan penuh makna dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seyogyanya tidak boleh ada hal yang dapat mencederai segala nilai-nilai kesakralan tersebut sesuai etika adat ketimuran. Misalnya saling menghujat sehingga terjadinya pertumpahan darah yang menimbulkan korban jiwa, caleg yang gantung diri, stres sampai gangguan yang lainnya. Semestinya dan seharusnya pemilu itu dilaksanakan dengan penuh khidmat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebebasan dalam menentukan pilihan, serta rahasia. Prinsip pemilu sudah baik dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia yang sudah dijalankan sejak dulu.

Dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (lang-

sung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber dan Jurdil dapat membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin dewasa dan berkualitas.

Namun menurut pengamatan saya dalam beberapa kali pemilu pasca orde reformasi. Asas Luber Jurdil mulai terkikis dan tergerus, tampak memudar dan seakan-akan tidak ada lagi asas tersebut. Banyak kejadian yang kita dapatkan di lapangan untuk menguatkan argumentasi ini. Meskipun tidak dapat kita katakan masif dan terstruktur, namun di berbagai daerah telah terindikasi bahwa prinsip luber dan jurdil sudah berkurang bahkan tidak ada lagi kejujuran, kebebasan menentukan pilihan, dan bahkan terjadi intimidasi dan suap menyuap terhadap para pemilih.

Yang perlu diperhatikan dan dirasakan berdasarkan fakta, sebagai implementasi dari asas ini sudah mulai abu-abu bahkan terang benderang menyimpang. Sistem yang dibuat berdasarkan undang-undang Pemilu sudah bagus, tetapi orang yang ada dalam lingkungan perpolitikan inilah yang menjadi penyebabnya, siapa yang salah? Pemimpin partai beserta jajarannya? Oknum? Ataukah masyarakatnya?

Pada kesempatan ini perkenalkan saya mengutip beberapa keterangan sebagai bahan perenungan terutama untuk penggiat politik dalam hal ini pelaku politik.

1. "Kehidupam di alam dunia ini adalah arena untuk mengumpulkan pahala bagi kehidupan akhirat.

Semakin banyak pahala halal yang berhasil kita raih, maka semakin tinggi pula tingkat kita kelak. Abdullah bin Abba berkata "Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia terdiri atas tiga bagian; sebagian bagi mukminin, sebagian bagi orang munafik, sebagian bagi orang kafir. Maka orang mukmin menyiapkan perbekalan, orang munafik menjadikan perhiasan, dan orang kafir menjadikannya tempat bersenang-senang."

2. Pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia apabila lulus dari ujian yang dihadapinya, ujian itu terletak pada dua jalur, yaitu *hablum-minalloh* dan jalur *hablum-minnanas*, pada kedua jalur ini Allah telah menentukan aturan main untuk bersikap. Oleh karena itu, Allah Swt. melengkapi manusia dengan mata, telinga, dan hati bukan tanpa tujuan, perlengkapan ini merupakan saran bagi Allah untuk menguji manusia, apakah dalam setiap situasi dan kondisi baik ataupun buruk, ia mampu tetap taat mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan-Nya atau tidak? (Buku Pertama Bahan Renungan, 1988, him. 4)

Dari tulisan tersebut, manusia dan para pemain politik yang mengaku islam perlu menyadari makna dan tujuan hidup, siapapun dia, presiden, legeslatif, eksekutif, terjun secara profesional untuk mencari pahala untuk bekal kelak di akhirat sesuai aturan Allah Swt. sehingga harus terjadi seleksi yang super ketat dengan

komitmen yang kuat pula, apa yang menjadi pilihan dia berpolitik? Jangan-jangan, hanya ingin terjadi perubahan perekonomian rumah tangganya? Jangan-jangan hanya nafsu kekuasaan? Jangan-jangan hanya memenuhi kuota tanpa *skill* yang memadai, dan banyak pertanyaan yang dapat digali, sehingga jangan-jangan.....?

Pendidikan politik yang beradab perlu disampaikan kepada kadernya, nah yang menjadi pertanyaan apakah pimpinan partai sudah melaksanakan ini dengan benar? Dengan melakukan menisme pendidikan politik yang berjenjang? Untuk sementara saya melihat belum, partai akan terlihat dan ramai tatkala ada Pilpres, Pilkada, dan Pileg, setelah itu berlalu sepi dengan kegiatan pendidikan perpolitikan, sosial perpolitikan, yang ramai KPK menagkapi mereka yang lengah dan menyalahi aturan perundang-undangan dengan nafsu korupsi yang hukumnya begitu ringan.

Esensinya bagaimana kita berpolitik untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya untuk dibawa pulang sebagai bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Renungan kutipan berikut ini.

1. "Baiklah kata Nabi Saw. yang mencemari akidah itu adalah kerakusan pada dunia; mengumpulkan dunia bukan secara halal, dan bersenang-senang dengan harta yang haram. Berbicara dengan perkataan orang baik-baik, tetapi berperilaku seperti perilaku para tiran. Barangsiapa yang menghadap Allah dengan tidak membawa hal-hal tersebut sedikitpun, dan mengucapkan *la illaha illallah*,

baginya surga."

3. "Barang siapa mengambil dunia dan meninggalkan akhirat, baginya neraka. Siapa saja yang membantu permusuhan, para penindas ataupun orang yang membantu untuk melakukan penindasan, maka malaikat pencabut nyawa akan datang membawa berita kepadanya bahwa ia mendapat laknat Allah, tempatnya kelak kekal neraka (Buku Kedua Bahan Renungan, 1988, hlm. 440).

Bila kita melakukan kajian analisis secara akurat terhadap perpolitikan di Indonesia, dengan membaca secara saksama isi pembukaan undang-undang, sudahkah mereka menyuarakan dan melaksanakan isi Undang-Undang 1945 secara penuh dan tanggung jawab?

Kepentingan rakyat yang harus menjadi titik fokus perhatian sudah beralih terhadap kepentingan partai atau kelompok tertentu dengan cara manuver yang tidak elegan bahkan saling mendeskreditkan satu sama lain. Ini fenomena yang terjadi sekarang, dengan sistem keterwakilan yang sedang berjalan, justru isu pelesetan yang mendekati kebenaranlah yang terlihat. Harta, fasilitas, kehormatan, jabatan, sudah terwakili oleh orang politik yang sedang menduduki amanah rakyatnya. Sementara rakyatnya terkebelakangan untuk menikmati hal tersebut, tidak seperti Rasul Saw yang mencontohkannya. Bilapun tidak sama bahkan tidak ada yang mampu menyamai-Nya minimal mendekatilah terhadap jiwa dan karakter Rasul Saw.

Camkan terhadap kutipan tersebut di atas, hidup ini pilihan dan harus dijalani secara ideal, meraih pahala kehidupan di dunia sebagai bekal kelak di akhirat. Janganlah tergoda kemilaunya dunia yang hanya fatamorgana indah mata. Indahya dunia harus sebanding lurus untuk mencapai kebahagiaan akhirat kelak. Jadi anggota dewan ataupun pimpinan tertinggi di Indonesia memang menjanjikan, tetapi ingat tugas dan amanah yang begitu berat harus dipikul dengan penuh tantangan. Iblis akan selalu menggoda manusia diberbagai lini kehidupan dari mulai gemerlapnya harta, tahta, wanita karena jabatan, pedoman utama jangan menyalahi aturan hidup yang telah Allah Swt .buat, biar selamat dunia akhirat.

## Simpulan

Tulisan ini sebagai perenungan dalam memilih kehidupan di dunia. Jadilah politisi yang islami yang membawa berqah hidup di dunia dan akhirat, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyalahi aturan baik aturan manusia terutama aturan agama. Janganlah salih menyalahkan, menjelekkan, bahkan tendensius terhadap fitnah yang mempermalukan antara orang-orang yang seaqidah.

Asas pemilu Luber dan Jurdil akan ternodai oleh orang yang sedang bermain dan menumpangi kapal politik, bukan oleh rakyat yang menjadi makmumnya. Hembusan keburukan, ketidakpuasan terhadap pemimpin sekarang dan masa lalu selalu disuarakan untuk menyerang dengan mengatasnamakan rakyat. Karakternya

berpolitik, kemenangan lawan akan selalu beriringan dengan kecurangan, kebaikan yang dilakukan diembel-embeli dengan kata pencitraan, untuk memenangkan pertarungan politik tidaklah selalu harus dengan menghalalkan segala cara. Adu program lebih baik dikedepankan, bukan dengan saling menjelek-jelekkan seperti saat ini. Ingat kata Bung Karno, "Pengalaman adalah guru terbaik," dan "Jangan Melupakan Sejarah."

Lihatlah kebaikan seseorang, bukan hanya melihat dan membicarakan kejelekan orang lain apalagi seaqidah, *ciwit diri sorangan lamun karasa nyeri, ulah nyiwit ka batur*, jagalah perkataanmu, karena mulutmu hari-maumu. Terakhir, jadikan Al'Quran dan Al'Sunnah sebagai pondasi utama dalam berperikehidupan selain Pancasila.

## Daftar Pustaka

- Buku Pertama. 1998. Bahan renungan. Jakarta.
- Buku Kedua. 1988. Bahan renungan. Jakarta.
- Faridl, Miftah. 1993. "Pokok-pokok ajaran Islam". Bandung: Pustaka.
- Hatta. 1979. "Bung Hatta Menjawab." Jakarta: PT Gunung Agung.
- Muhammad,S. 2000. "Pilar-pilar Agama Islam." Jakarta: Pustaka Azzam.
- Thata, N. 1983. "Pandangan Hidup Berdasarkan Al-Quran." Semarang: Ramadhani.